

## MEMBEDAH STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DENGAN ELEMENNYA UNTUK KEBIJAKAN PUBLIK

Abiyyu Faathir<sup>1</sup>, Cynthia Nissa Ibrahim<sup>2</sup>, Nazella Naeni Putri<sup>3</sup>, Rifqi Muzakki<sup>4</sup>  
[abiyyufaathir123@gmail.com](mailto:abiyyufaathir123@gmail.com)<sup>1</sup>, [cynthianissa11@gmail.com](mailto:cynthianissa11@gmail.com)<sup>2</sup>, [putrinazella0@gmail.com](mailto:putrinazella0@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rifqimuzakki240@gmail.com](mailto:rifqimuzakki240@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Budi Luhur

### ABSTRACT

*This research examines the structure and components of public sector financial statements and their role in supporting the public policy formulation process in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach and literature analysis of official documents and recent scientific journals, it was found that financial reports, which include the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Cash Flow Statement, and Notes to Financial Statements, are essential as a source of accurate and transparent information for decision makers and the public. However, at the local and village government levels, the quality of financial reports is still limited due to a lack of human resource capabilities and weak internal controls. Therefore, increasing the capacity of the apparatus and strengthening the financial management system are crucial. Optimal utilization of financial reports is expected to strengthen accountability, transparency, and effectiveness in the implementation of public policies, especially in regional financial management and the implementation of fiscal decentralization.*

**Keywords:** Public Sector Financial Statements, Public Policy, Fiscal Decentralization.

### PENDAHULUAN

Di era transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin menghangat, laporan keuangan sektor publik memegang peran penting sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Informasi yang disajikan melalui pelaporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan yang efektif di sektor pemerintahan. Dalam konteks tata kelola keuangan yang baik, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah (Kholis, Rarikasari, & Yufita, 2023).

Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak hanya mencerminkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, tetapi juga menyediakan informasi penting bagi perumusan kebijakan yang berbasis data. Struktur laporan keuangan sektor publik di Indonesia terdiri dari beberapa elemen utama: Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam menyajikan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan.

Pemahaman yang mendalam terhadap struktur dan elemen-elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat digunakan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Namun, meskipun struktur laporan keuangan telah distandarkan, tantangan dalam implementasi masih ada khususnya pada tingkat pemerintahan desa dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas laporan keuangan di tingkat desa sering disebabkan oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia serta lemahnya sistem akuntabilitas yang diterapkan (Bustam, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan laporan keuangan sektor publik dalam kebijakan tidak hanya memerlukan

struktur yang baik, tetapi juga dukungan dari sisi manajemen dan pengawasan.

Sebagai ilustrasi, dalam APBN Tahun Anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Kebijakan belanja ini diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk membedah struktur dan elemen laporan keuangan sektor publik serta menganalisis kontribusinya terhadap proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. Dengan memahami secara mendalam setiap komponen laporan keuangan, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana informasi keuangan dapat digunakan secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam sektor publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang dimana metode ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memahami secara mendalam struktur serta elemen-elemen yang ada di laporan keuangan sektor publik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik. Metode ini dipilih karena mampu mengeksplorasi bagaimana laporan keuangan di sektor publik, mendeskripsikan fenomena secara detail, serta mengidentifikasi variasi dan persepsi yang muncul dari data yang dikumpulkan.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan melalui studi literatur dengan menganalisis dokumen resmi (seperti laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan terkait). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Jurnal Ilmiah nasional dan internasional (terbitan tahun 2021-2025).
2. Laporan resmi pemerintahan (seperti laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta peraturan terkait)
3. Dokumen kebijakan dan publikasi daring (website resmi, artikel, laporan tahunan)

Dengan data yang bersumber seperti diatas dan beberapa teknik pengumpulan data penelitian ini, diantaranya:

1. Pencarian dan seleksi literatur (Menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar dan repositori Universitas)
2. Eksplorasi data sekunder (menggunakan data dari laporan dan publikasi resmi yang tersedia secara daring)
3. Pemilihan dan pengumpulan data (Berdasarkan relevansi, aktualitas, dan kredibilitas sumber).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur laporan keuangan sektor publik di Indonesia, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, telah distandarisasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam menyajikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat umum.

Namun, implementasi standar ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat pemerintahan daerah dan desa. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya sistem akuntabilitas menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan informasi

keuangan sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai standar tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Informasi yang akurat dan mudah diakses memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja pemerintah dan menentukan prioritas kebijakan yang tepat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti pentingnya laporan keuangan sektor publik sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Indonesia. Struktur laporan keuangan yang telah distandarisasi, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi para pemangku kepentingan. Namun, kualitas laporan keuangan di tingkat daerah dan desa masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengendalian internal.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pengelolaan keuangan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting. Laporan keuangan yang disusun secara baik tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, optimalisasi laporan keuangan sektor publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya kebijakan publik yang efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bustam, M. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Larompong Selatan. *Jurnal Studi Riset*, 3(2), 1-12.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2024). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025.
- Kholis, M., Rafikasari, R., & Yufita, C. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Teknologi dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1190-1205